



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG	: EKSEKUTIF
LEMBAGA	: PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNIT KERJA	: DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
I. DATA PRIBADI	
1. Nama	: AZRAL
2. Jabatan	: KEPALA DINAS
3. NIK	: 239218
II. DATA HARTA	
A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp. 1.485.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/126 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI	Rp. 1.350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/216 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG, HASIL SENDIRI	Rp. 135.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp. 142.500.000
1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp. 140.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI	Rp. 2.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 100.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp. ---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp. 156.724.852
F. HARTA LAINNYA	Rp. ---
Sub Total	Rp. 1.884.224.852
III. HUTANG	Rp. ---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp. 1.884.224.852

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PESMAR
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NIK : 500262

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 105.000.000

1. Tanah Seluas 1.216 m2 di KAB / KOTA PESIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/250 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 28.480.000

1. MOTOR, SUZUKI BEBEK Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 19.980.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 90.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 223.480.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 223.480.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG	: EKSEKUTIF		
LEMBAGA	: PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN		
UNIT KERJA	: DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
I. DATA PRIBADI			
1. Nama	: SURMIANI		
2. Jabatan	: KEPALA BIDANG		
3. NHK	: 504808		
II. DATA HARTA			
A. TANAH DAN BANGUNAN		Rp.	880.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/375 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI	Rp. 400.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/113 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG, HASIL SENDIRI	Rp. 480.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		Rp.	97.800.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI	Rp. 2.800.000		
2. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S AUTOMATIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI	Rp. 95.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	----
D. SURAT BERHARGA		Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	6.453.593
F. HARTA LAINNYA		Rp.	----
Sub Total		Rp.	984.253.593
III. HUTANG		Rp.	308.796.907
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	675.456.686

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HASRUL SANI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 500518

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	300.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 6.000 m2/6.000 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	27.000.000
1. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	175.551.610
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	502.551.610
III. HUTANG	Rp.	385.641.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	116.910.610

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.